

Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

MATRIKS PENILAIAN LAPORAN EVALUASI DIRI DAN LAPORAN KINERJA PERGURUAN TINGGI PERGURUAN TINGGI VOKASI, PERGURUAN TINGGI NEGERI (PTN) BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
1	A Kondisi Eksternal	Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	Perguruan tinggi mampu: 1) mengidentifikasi kondisi lingkungan yang relevan, komprehensif, dan strategis, 2) menetapkan posisi perguruan tinggi relatif terhadap lingkungannya, 3) menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis SWOT/analisis lain yang relevan, dan 4) menghasilkan program pengembangan yang konsisten dengan hasil analisis SWOT/analisis lain yang digunakan.	Perguruan tinggi mampu: 1) mengidentifikasi kondisi lingkungan yang relevan dan komprehensif, 2) menetapkan posisi perguruan tinggi relatif terhadap lingkungannya, 3) menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis SWOT/analisis lain yang relevan, dan 4) menghasilkan program pengembangan yang konsisten dengan hasil analisis SWOT/analisis lain yang digunakan.	Perguruan tinggi mampu: 1) mengidentifikasi kondisi lingkungan yang relevan, 2) menetapkan posisi perguruan tinggi relatif terhadap lingkungannya, 3) menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis SWOT/analisis lain yang relevan, dan 4) menghasilkan program pengembangan yang konsisten dengan hasil analisis SWOT/analisis lain yang digunakan.	Perguruan tinggi: 1) mampu mengidentifikasi kondisi lingkungan yang relevan, 2) belum mampu menetapkan posisi perguruan tinggi relatif terhadap lingkungannya, 3) belum menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis SWOT/analisis lain yang relevan, dan 4) menghasilkan program pengembangan yang tidak konsisten dengan hasil analisis SWOT/analisis lain yang digunakan.	Perguruan tinggi tidak melakukan analisis terhadap kondisi lingkungan.
2	B Profil Institusi	Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.	Deskripsi profil institusi menunjukkan keserbacakupan informasi yang disampaikan secara ringkas dan jelas, serta konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.	Deskripsi profil institusi menunjukkan keserbacakupan informasi yang disampaikan dengan jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.	Deskripsi profil institusi menunjukkan keserbacakupan informasi dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.	Deskripsi profil institusi kurang menunjukkan keserbacakupan informasi dan kurang konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.	Deskripsi profil institusi tidak menunjukkan keserbacakupan informasi dan tidak konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
3	C Kriteria C.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran C.1.4 Indikator Kinerja Utama	Perguruan Tinggi memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.	Perguruan tinggi memiliki: 1) rancangan pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, 2) indikator kinerja, 3) target yang berorientasi pada daya saing internasional dan telah dilaksanakan dengan konsisten, 4) tujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, dan 5) sasaran yang mengarah pada nation economic development.	Perguruan tinggi memiliki: 1) rancangan pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, 2) indikator kinerja, 3) target yang berorientasi pada daya saing nasional dan telah dilaksanakan dengan konsisten, dan 4) tujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan.	Perguruan tinggi memiliki: 1) rancangan pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, 2) indikator kinerja, 3) target yang telah dilaksanakan, dan 4) tujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini.	Perguruan tinggi memiliki rancangan pengembangan yang dilengkapi dengan 1 dari 2 aspek berikut: 1) indikator kinerja, atau 2) target.	Perguruan tinggi tidak memiliki rancangan pengembangan.
4	C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama C.2.4 Indikator Kinerja Utama C.2.4.a) Sistem Tata Pamong	A. Ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal sistem tata pamong tetapi belum dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan.	Perguruan tinggi belum memiliki dokumen formal sistem tata pamong.

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
		B. Ketersediaan bukti yang sah terkait upaya institusi melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi.	Perguruan tinggi memiliki dokumen yang tidak sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi.	Perguruan tinggi tidak memiliki dokumen kebijakan dan peraturan guna menjamin integritas dan kualitas institusi.
		C. Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal struktur organisasi, termasuk <i>industrial advisory board</i> yang disesuaikan dengan kebutuhan program yang diselenggarakan, dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal struktur organisasi, termasuk <i>industrial advisory board</i> yang disesuaikan dengan kebutuhan program yang diselenggarakan, dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal struktur organisasi, termasuk <i>industrial advisory board</i> yang disesuaikan dengan kebutuhan program yang diselenggarakan, dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi namun tidak dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi.	Perguruan tinggi tidak memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi.
		D. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan Good University Governance (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat (PP No. 4 Tahun 2014 Pasal 33 ayat 3).	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik penyelenggaraan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik penyelenggaraan GUG namun hanya mencakup beberapa aspek GUG (kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko).	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti yang sah terkait praktik penyelenggaraan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko.

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
		E. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas. Skor = $(A + (2 \times B) + C + (2 \times D) + (2 \times E)) / 8$	Perguruan tinggi memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.	Perguruan tinggi memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten.	Perguruan tinggi memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.	Perguruan tinggi memiliki lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang tidak berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.	Perguruan tinggi tidak memiliki lembaga/fungsi yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.
5	C.2.4.b) Kepemimpinan	A. Ketersediaan dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk mencapai visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dan rinci untuk mencapai visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk mencapai visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal yang tidak lengkap terkait penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas.	Perguruan tinggi tidak memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen.
		B. Ketersediaan bukti yang sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan <i>stakeholders</i> internal untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan <i>stakeholders</i> internal yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan <i>stakeholders</i> internal yang dilakukan secara terprogram untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan <i>stakeholders</i> internal untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang terdokumentasi namun tidak sah sebagai alat bukti terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan <i>stakeholders</i> internal.	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan <i>stakeholders</i> internal.

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
		<p>C. Ketersediaan bukti kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.</p> <p>Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$</p>	Perguruan tinggi memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah tentang telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah tentang telaah yang komprehensif dan perbaikan terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah tentang telaah dan perbaikan pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang terdokumentasi tentang telaah dan perbaikan pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen, namun tidak sah.	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti yang terdokumentasi tentang telaah dan perbaikan pelaksanaan kepemimpinan dan personil di tingkat manajemen institusi.
6	C.2.4.c) Pengelolaan	<p>A. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perencanaan (<i>planning</i>), 2) pengorganisasian (<i>organizing</i>), 3) penempatan personil (<i>staffing</i>), 4) pengarahan (<i>leading</i>), dan 5) pengawasan (<i>controlling</i>). 	Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien.	Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten.	Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek.	Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi namun belum mencakup semua aspek.	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi.

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
		<p>B. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama. 	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci mencakup 11 aspek.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan namun belum mencakup semua aspek.	Perguruan tinggi tidak memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan.
		<p>C. Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama. 	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien mencakup 11 aspek.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten mencakup 11 aspek.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan 11 aspek	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman namun belum mencakup semua aspek.	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan.

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
		<p>D. Ketersediaan dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.</p> <p>Skor = $((2 \times A) + B + (2 \times C) + D) / 6$</p>	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapannya, yang mencakup 5 aspek dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapannya, yang mencakup 5 aspek dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat nasional.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapannya, yang mencakup 5 aspek.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana strategis dan belum mencakup semua aspek terkait bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapannya.	Perguruan tinggi tidak memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapannya.
7	C.2.4.d) Sistem Penjaminan Mutu	<p>A. Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut.</p>	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (<i>Risk Based Audit</i>) atau inovasi lainnya.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek dan memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI namun belum mencakup seluruhnya.	Perguruan tinggi tidak menjalankan SPMI.

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
		<p>B. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan. <p>Skor = $(A + (2 \times B)) / 3$</p>	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen yang mengagendakan pembahasan sebagian dari 7 unsur.	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen.	Tidak ada Skor kurang dari 2.	
8	Tabel 1.a LKPT Sertifikasi/Akreditasi Eksternal	<p>A. Perolehan sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi</p> <p>B. Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi</p>	<p>Jika $NK \geq 8$, maka Skor_A = 4 .</p> <p>$NK = 4 \times N_A + 2 \times N_B + N_C$ N_A = Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi atau fakultas yang diberikan oleh lembaga internasional bereputasi. N_B = Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi (selain oleh BAN-PT) atau fakultas yang diberikan oleh lembaga nasional bereputasi. N_C = Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup unit (laboratorium, dll.) yang diberikan oleh lembaga internasional/nasional bereputasi.</p>	<p>Jika $NK < 8$, maka Skor_A = $NK / 2$.</p>	Tidak ada Skor kurang dari 2.	Tidak ada Skor kurang dari 2.	
			<p>Jika $P_{AI} \geq 5\%$, maka Skor_B = 4 .</p>	<p>Jika $P_{AI} < 5\%$, maka Skor_B = $2 + (40 \times P_{AI})$.</p>	Tidak ada Skor kurang dari 2.	Tidak ada Skor kurang dari 2.	

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
		internasional bereputasi. Skor = (Skor_A + Skor_B) / 2	$P_{AI} = (N_{AI} / N_{PS}) \times 100\%$ N_{AI} = Jumlah program studi pada program utama yang terakreditasi oleh lembaga internasional bereputasi. N_{PSU} = Jumlah program studi pada program utama.				
9	Tabel 1.a LKPT Audit Eksternal Keuangan	Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi.	Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (<i>Unqualified Opinion</i>).	Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (<i>Modified Unqualified Opinion</i>).	Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian (<i>Qualified Opinion</i>).	Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Tidak Wajar (<i>Adverse Opinion</i>).	Tidak ada audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik atau Audit eksternal dilakukan oleh kantor Akuntan Publik dengan Tanpa Opini (<i>Disclaimer of Opinion</i>).
10	Tabel 1.b LKPT Akreditasi Program Studi	Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).	Jika $N_{SA} \geq 3,50$, maka Skor = 4.	Jika $N_{SA} < 3,50$, maka Skor = $NSA + 0,5$.			
			$N_{SA} = (4 \times N_{Unggul} + 3,5 \times N_A + 3 \times N_{Baik_Sekali} + 2,5 \times N_B + 2 \times N_{Baik} + 1,5 \times N_C + 1,5 \times N_M) / N_{PS}$ N_{Unggul} = Jumlah program studi terakreditasi Unggul. N_{Baik_Sekali} = Jumlah program studi terakreditasi Baik Sekali. N_{Baik} = Jumlah program studi terakreditasi Baik. N_A = Jumlah program studi terakreditasi A. N_B = Jumlah program studi terakreditasi B. N_C = Jumlah program studi terakreditasi C. N_M = Jumlah program studi terakreditasi minimum (program studi baru). N_K = Jumlah program studi tidak terakreditasi/ kadaluarsa. N_{PS} = Jumlah seluruh program studi ($N_{Unggul} + N_A + N_{Baik_Sekali} + N_B + N_{Baik} + N_C + N_M + N_K$).				
11	C.2.4.d) Kerjasama	A. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri).	Perguruan tinggi tidak memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan.

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
		B. Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.	Perguruan tinggi memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi.	Perguruan tinggi memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi.	Perguruan tinggi memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan guna mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.	Perguruan tinggi memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang tidak mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis institusi.	Perguruan tinggi tidak memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan.
		C. Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatannya kerjasama.	Perguruan tinggi memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.	Perguruan tinggi memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah dan nasional.	Perguruan tinggi memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dan bermanfaat bagi institusi.	Perguruan tinggi memiliki jejaring dan mitra kerjasama namun tidak relevan.	Perguruan tinggi tidak memiliki jejaring dan mitra kerjasama.
		D. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis. Skor = (A + B + (2 x C) + (4 x D)) / 8	Perguruan tinggi memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis.	Perguruan tinggi memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis.	Perguruan tinggi memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis.	Perguruan tinggi memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, namun belum ada upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis.	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan.
12	Kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PKM dalam 3 tahun terakhir.		Jika $R_1 \geq a$, maka Skor = 4 .	Jika $R_1 < a$ dan $R_N \geq b$, maka Skor = $3 + (R_1 / a)$. Jika $0 < R_1 < a$ atau $0 < R_N < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (R_1/a)) + (R_N/b) - ((R_1 \times R_N) / (a \times b))$	Jika $R_1 = 0$ dan $R_N = 0$ dan $R_L \geq c$, maka Skor = 2 . Jika $R_1 = 0$ dan $R_N = 0$ dan $R_L < c$, maka Skor = $(2 \times R_L) / c$.		

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
			$R_I = N_I / N_{DT}$, $R_N = N_N / N_{DT}$, $R_L = N_L / N_{DT}$ Faktor: a = 0,02 , b = 0,2 , c = 0,5 N_I = Jumlah kerjasama tridharma tingkat internasional. N_N = Jumlah kerjasama tridharma tingkat nasional. N_L = Jumlah kerjasama tridharma tingkat wilayah/lokal. N_{DT} = Jumlah dosen tetap.				
13	C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan	Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pada tiap kriteria.	Perguruan tinggi memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Perguruan tinggi menetapkan standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing nasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Perguruan tinggi tidak menetapkan indikator kinerja tambahan.	Tidak ada Skor kurang dari 2.	
14	C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.	Analisis pencapaian kinerja perguruan tinggi yang memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	Analisis pencapaian kinerja perguruan tinggi yang memenuhi 2 aspek dan dilaksanakan setiap tahun.	Analisis pencapaian kinerja perguruan tinggi yang memenuhi 2 aspek.	Perguruan tinggi memiliki laporan pencapaian kinerja namun belum dianalisis dan dievaluasi.	Perguruan tinggi tidak memiliki laporan pencapaian kinerja.

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
15	C.2.7 Penjaminan Mutu	Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.	Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal.	Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu.	Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek.	Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu namun belum efektif serta belum memenuhi seluruh aspek.	Perguruan tinggi belum melaksanakan sistem penjaminan mutu.

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
16	C.2.8 Kepuasan pemangku kepentingan.	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek dan hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria namun belum memenuhi seluruh aspek.	Perguruan tinggi tidak melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria.
17	C.3 Mahasiswa C.3.4 Indikator Kinerja Utama C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa Tabel 2.a LKPT Seleksi Mahasiswa	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama.	Jika Rasio ≥ 5 , maka Skor = 4 .	Jika $1 < \text{Rasio} < 5$, maka Skor = $(3 + \text{Rasio}) / 2$.	Jika Rasio ≤ 1 , maka Skor = $2 \times \text{Rasio}$.		
			$\text{Rasio} = N_{Ai} / N_{Bi}$ $N_{Ai} = \text{Jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi pada program utama. } i = 1, 2, \dots, \text{ atau } 7.$ $N_{Bi} = \text{Jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi pada program utama. } i = 1, 2, \dots, \text{ atau } 7.$				

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
18		Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama	Jika $P_{DU} \geq 95\%$, maka Skor = 4 .	Jika $25\% < P_{DU} < 95\%$, maka Skor = $((40 \times P_{DU}) - 10) / 7$.			Jika $P_{DU} \leq 25\%$, maka Skor = 0 .
			$P_{DU} = (N_{Ci} / N_{Bi}) \times 100\%$ N_{Bi} = Jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi pada program utama. $i = 1, 2, \dots$, atau 7. N_{Ci} = Jumlah calon mahasiswa baru reguler pada program utama. $i = 1, 2, \dots$, atau 7.				
19	Tabel 2.b LKPT Mahasiswa Asing	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	Jika $P_{MA} \geq 0,5\%$, maka Skor = 4 .	Jika $P_{MA} < 0,5\%$, maka Skor = $2 + (400 \times P_{MA})$.	Tidak ada Skor kurang dari 2.		
			$P_{MA} = (N_{WNA} / N_M) \times 100\%$ N_{WNA} = Jumlah mahasiswa asing dalam 3 tahun terakhir. N_M = Jumlah mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir.				
20	C.3.4.b) Layanan Kemahasiswaan	Ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan.	Perguruan tinggi menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) peningkatan kesejahteraan, serta 3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	Perguruan tinggi menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, dan 2) peningkatan kesejahteraan.	Perguruan tinggi menyediakan layanan kemahasiswaan yang dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan minat dan bakat.	Tidak ada Skor antara 0 dan 2.	Perguruan tinggi tidak menyediakan layanan kemahasiswaan.
21	C.4 Sumber Daya Manusia C.4.4 Indikator Kinerja Utama C.4.4.a) Profil Dosen Tabel 3.a.1) LKPT Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	Jika $R_{DPS} \geq 12$, maka Skor = 4 .	Jika $6 \leq R_{DPS} < 12$, maka Skor = $R_{DPS} / 3$.	Jika $R_{DPS} < 6$, maka perguruan tinggi tidak terakreditasi.		
			Keterangan: Data dosen tetap tercantum dalam laman PD-DIKTI. Jika terdapat program studi yang tidak memenuhi syarat jumlah dosen minimum (jumlah dosen kurang dari 6), maka perguruan tinggi tidak terakreditasi. $R_{DPS} = N_{DT} / N_{PS}$ N_{DT} = Jumlah dosen tetap. N_{PS} = Jumlah program studi.				
22	Tabel 3.a.2) LKPT Jabatan Fungsional Dosen	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala terhadap jumlah seluruh dosen tetap.	Jika $P_{LKGB} \geq 25\%$, maka Skor = 4 .	Jika $P_{LKGB} < 25\%$, maka Skor = $1 + (12 \times P_{LKGB})$.	Tidak ada Skor kurang dari 1.		
			$P_{LKGB} = (NDT_{LKGB} / N_{DT}) \times 100\%$ NDT_{LKGB} = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala atau Guru Besar. N_{DT} = Jumlah dosen tetap.				
23	Tabel 3.a.3) LKPT Sertifikasi Dosen	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi,	Jika $P_{DS} \geq 50\%$, maka Skor = 4 .	Jika $P_{DS} < 50\%$, maka Skor = $1 + (6 \times P_{DS})$.	Tidak ada Skor kurang dari 1.		

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
		profesi, dan/atau industri terhadap jumlah seluruh dosen tetap.	$P_{DS} = (N_{DS} / N_{DT}) \times 100\%$ N_{DS} = Jumlah dosen tetap bersertifikasi kompetensi, profesi, dan/atau industri.. N_{DT} = Jumlah dosen tetap.				
24	Tabel 3.a.4) LKPT Dosen Tidak Tetap	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap).	Jika $P_{DTT} \leq 10\%$, maka Skor = 4 .	Jika $10\% < P_{DTT} \leq 40\%$, maka Skor = $(14 - (20 \times P_{DTT})) / 3$.	Jika $P_{DTT} > 40\%$, maka perguruan tinggi tidak terakreditasi .		
			$P_{DTT} = (N_{DTT} / (N_{DTT} + N_{DT})) \times 100\%$ N_{DTT} = Jumlah dosen tidak tetap. N_{DT} = Jumlah dosen tetap.				
25	Tabel 3.b LKPT Beban Kerja Dosen	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap.	Jika $12 \leq R_{MDT} \leq 24$, maka Skor = 4 .	Jika $R_{MDT} < 12$, maka Skor = $R_{MDT} / 3$.		Jika $R_{MDT} \geq 40$, maka Skor = 0 .	
			$R_{MDT} = N_M / N_{DT}$ N_M = Jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada program sarjana terapan dan/atau diploma tiga pada saat TS. N_{DT} = Jumlah dosen tetap.				
26	C.4.4.b) Kinerja Dosen Tabel 3.c.1) LKPT Produktivitas Penelitian Dosen	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir.	Jika $R_i \geq a$, maka Skor = 4 .	Jika $R_i < a$ dan $R_N \geq b$, maka Skor = $3 + (R_i / a)$.	Jika $R_i = 0$ dan $R_N = 0$ dan $R_L \geq c$, maka Skor = 2 .		
			$R_i = N_i / 3 / N_{DT}$, $R_N = N_N / 3 / N_{DT}$, $R_L = N_L / 3 / N_{DT}$ Faktor: a = 0,05 , b = 0,5 , c = 1 N_i = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun terakhir. N_N = Jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir. N_L = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir. N_{DT} = Jumlah dosen tetap.				
27	Tabel 3.c.2) LKPT Produktivitas PkM Dosen	Rata-rata PkM/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir.	Jika $R_i \geq a$, maka Skor = 4 .	Jika $R_i < a$ dan $R_N \geq b$, maka Skor = $3 + (R_i / a)$.	Jika $R_i = 0$ dan $R_N = 0$ dan $R_L \geq c$, maka Skor = 2 .		
			$R_i = N_i / 3 / N_{DT}$, $R_N = N_N / 3 / N_{DT}$, $R_L = N_L / 3 / N_{DT}$ Faktor: a = 0,05 , b = 0,5 , c = 1 N_i = Jumlah PkM dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun terakhir. N_N = Jumlah PkM dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir. N_L = Jumlah PkM dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir. N_{DT} = Jumlah dosen tetap.				

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
28	Tabel 3.d LKPT Rekognisi Dosen	Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.	Jika $R_{RD} \geq 0,25$, maka Skor = 4 .	Jika $R_{RD} \leq 0,25$, maka Skor = $2 + (8 \times R_{RD})$.		Tidak ada Skor kurang dari 2.	
Pencapaian prestasi dosen dalam bentuk seperti: (1) menjadi <i>visiting professor</i> di perguruan tinggi nasional/ internasional. (2) menjadi <i>keynote speaker/invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. (3) menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional. (4) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi. (5) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional. $R_{RD} = N_{RD} / N_{DT}$ N_{RD} = Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tetap dalam 3 tahun terakhir. N_{DT} = Jumlah dosen tetap.							
29	C.4.4.c) Tenaga Kependidikan	Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.).	Perguruan tinggi memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, instruktur, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif.	Perguruan tinggi memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, instruktur, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma dan fungsi institusi secara efektif.	Perguruan tinggi memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, instruktur, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma secara efektif.	Perguruan tinggi memiliki tenaga kependidikan yang belum memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, instruktur, dll.)	Tidak ada Skor kurang dari 1.
30	C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana C.5.4 Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan Tabel 4.a LKPT Perolehan Dana	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	Jika $P_{DM} \leq 40\%$, maka Skor = 4 .	Jika $40\% < P_{DM} < 55\%$, maka Skor = $(28 - (40 \times P_{DM})) / 3$.		Jika $P_{DM} \geq 55\%$, maka Skor = $(40 - (40 \times P_{DM})) / 9$.	
$P_{DM} = (D_M / D_T) \times 100\%$ D_M = Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. D_T = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.							
31		Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain	Jika $P_{DL} \geq 10\%$, maka Skor = 4 .	Jika $P_{DL} < 10\%$, maka Skor = $(20 \times P_{DL}) + 2$.		Tidak ada Skor kurang dari 2.	

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
		dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	Perolehan dana melalui: a. pendapatan atas kegiatan/ <i>income generating activities</i> (jasa layanan profesi dan/atau keahlian, produk institusi, kerjasama kelembagaan, dll.), b. sumber lain (hibah, dana lestari dan filantropis, dll.). $P_{DL} = (D_K / D_T) \times 100\%$ D_L = Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. D_T = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.				
32	Tabel 4.b LKPT Penggunaan Dana	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun.	Jika $D_{OM} \geq 20$, maka Skor = 4 .	Jika $D_{OM} < 20$, maka Skor = $D_{OM} / 5$.			
			$D_{OM} = D_{OP} / N_M$ D_{OP} = Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). N_M = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.				
33		Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	Jika $D_{PD} \geq 10$, maka Skor = 4 .	Jika $D_{PD} < 10$, maka Skor = $(2 \times D_{PD}) / 5$.			
			$D_{PD} = D_P / 3 / N_{DT}$ D_P = Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). N_{DT} = Jumlah dosen tetap.				
34		Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.	Jika $D_{PKMD} \geq 10$, maka Skor = 4 .	Jika $D_{PKMD} < 10$, maka Skor = $(2 \times D_{PKMD}) / 5$.			
			$D_{PKMD} = D_{PKM} / 3 / N_{DT}$ D_{PKM} = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). N_{DT} = Jumlah dosen tetap.				
35		Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	Jika $P_{DP} \geq 2,5\%$, maka Skor = 4 .	Jika $P_{DP} < 2,5\%$, maka Skor = $160 \times P_{DP}$.			
			$P_{DP} = (D_P / D_T) \times 100\%$ D_P = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir. D_T = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.				
36		Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.	Jika $P_{DPKM} \geq 2,5\%$, maka Skor = 4 .	Jika $P_{DPKM} < 2,5\%$, maka Skor = $160 \times P_{DPKM}$.			
			$P_{DPKM} = (D_{PKM} / D_T) \times 100\%$ D_{PKM} = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PkM dalam 3 tahun terakhir. D_T = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.				

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
37	C.5.4.b) Sarana dan Prasarana	A. Kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi yang mendukung pembelajaran, penelitian, dan PkM, sekaligus untuk kegiatan pengembangan dan pelayanan termasuk <i>teaching factory (factory for teaching)</i> atau <i>teaching industry (attachment ke industri)</i> .	Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana yang: 1) relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran (ketersediaan alat pada saat praktik mencukupi sehingga memungkinkan seorang mahasiswa mempraktikkannya secara langsung), penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang dibutuhkan khusus sesuai SN-DIKTI. 2) mendukung tridharma melalui keberadaan <i>teaching factory (factory for teaching)</i> atau <i>teaching industry (attachment ke industri)</i> .	Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana yang: 1) relevan untuk mendukung pembelajaran (ketersediaan alat pada saat praktik mencukupi sehingga mahasiswa menggunakannya secara langsung), penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang dibutuhkan khusus sesuai SN-DIKTI. 2) mendukung tridharma melalui start up/inkubator <i>teaching factory (factory for teaching)</i> atau <i>teaching industry (attachment ke industri)</i> .	Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran (ketersediaan alat pada saat praktik memungkinkan mahasiswa menggunakannya secara langsung), penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang dibutuhkan khusus sesuai SN-DIKTI.	Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana yang kurang mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang dibutuhkan khusus sesuai SN-DIKTI.	Perguruan tinggi tidak memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran, penelitian, dan PkM dan memfasilitasi yang dibutuhkan khusus sesuai SN-DIKTI.

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
		B. Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya (misal: Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi/ SIMPT).	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, dan 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan.	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, dan 3) lengkap dan mutakhir.	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi namun belum memenuhi seluruh aspek.	Perguruan tinggi tidak memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
		<p>C. Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi Pendidikan/ Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan PkM, Sistem Informasi Perpustakaan, dll.).</p> <p>Skor = $((2 \times A) + B + C) / 4$</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ketersediaan layanan <i>e-learning</i>, perpustakaan (<i>e-journal</i>, <i>e-book</i>, <i>e-repository</i>, dll.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi. 	<p>Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ketersediaan layanan <i>e-learning</i>, perpustakaan (<i>e-journal</i>, <i>e-book</i>, <i>e-repository</i>, dll.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala. 	<p>Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ketersediaan layanan <i>e-learning</i>, perpustakaan (<i>e-journal</i>, <i>e-book</i>, <i>e-repository</i>, dll.), dan 2) mudah diakses oleh sivitas akademika. 	<p>Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM namun belum lengkap.</p>	<p>Perguruan tinggi tidak memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM.</p>
38	<p>C.6 Pendidikan C.6.4 Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum</p>	<p>A. Perguruan tinggi memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 2) perkembangan industri, 3) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, dan 4) penerapan metode pembelajaran system ganda (<i>dual system</i>), di industri dan di perguruan tinggi. 	<p>Perguruan tinggi memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan 4 aspek.</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan aspek 1), 2) dan 3).</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan aspek 1) dan 2).</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang kurang mempertimbangkan aspek 1) dan 2).</p>	<p>Perguruan tinggi tidak memiliki kebijakan pengembangan kurikulum.</p>

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
		B. Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum.	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi nasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum namun belum lengkap.	Perguruan tinggi tidak memiliki pedoman pengembangan kurikulum.

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
		<p>C. Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.</p> <p>Skor = (A + B + C) / 3</p>	Perguruan tinggi memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	Perguruan tinggi memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan dan pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaiannya.	Perguruan tinggi memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan.	Perguruan tinggi memiliki pedoman implementasi kurikulum namun tidak lengkap.	Perguruan tinggi tidak memiliki pedoman implementasi kurikulum.
39	C.6.4.b) Pembelajaran	<p>A. Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.</p>	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang belum lengkap tentang penerapan sistem penugasan dosen.	Perguruan tinggi tidak memiliki pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen.
		<p>B. Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.</p>	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki pedoman tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang belum lengkap tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	Perguruan tinggi belum memiliki pedoman tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.
		<p>C. Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem pemonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.</p> <p>Skor = (A + (2 x B) + (2 x C)) / 5</p>	Perguruan tinggi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	Perguruan tinggi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi dan ditindak lanjuti.	Perguruan tinggi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi.	Perguruan tinggi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang mutu proses pembelajaran namun hasilnya belum terdokumentasi.	Perguruan tinggi belum melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang mutu proses pembelajaran.

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
40	Tabel 2.c LKPT Bobot Kredit Mata Kuliah	Persentase jumlah kredit mata kuliah praktikum/praktik/ praktik kerja lapangan (PKL) terhadap jumlah kredit seluruh mata kuliah.	Jika $50\% \leq PKP \leq 70\%$, maka Skor = 4 .	Jika $PKP < 50\%$, maka Skor = 8 x PKP atau Jika $PKP > 70\%$, maka Skor = $(40 - (40 \times PKP)) / 3$.			
			$P_{KP} = (N_{KP} / N_{KT}) \times 100\%$ N_{KP} = Jumlah kredit mata kuliah praktikum/praktik/praktik kerja lapangan selama masa program. N_{KT} = Jumlah kredit seluruh mata kuliah.				
41	C.6.4.c) Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran	A. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang belum lengkap untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian atau PkM ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi tidak memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
		B. Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian secara terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang belum lengkap tentang pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian secara terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi tidak memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian secara terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
		C. Ketersediaan bukti yang sah bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran namun belum mencakup seluruh unit.	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.
42	C.6.4.d) Suasana Akademik	A. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal yang kurang lengkap tentang kebijakan suasana akademik.	Perguruan tinggi tidak memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik.

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
		<p>B. Ketersediaan bukti yang sah tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif yang dapat berupa:</p> <p>a) Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM baik pada skala lokal/nasional/ internasional.</p> <p>b) Keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai.</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun namun hanya sebagian hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti.</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun.</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang tingkat kepuasan <i>stakeholders</i> tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif.</p>	<p>Perguruan tinggi tidak memiliki bukti yang sah tentang tingkat kepuasan <i>stakeholders</i> tentang suasana akademik.</p>
		<p>C. Ketersediaan bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik.</p> <p>Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten.</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif.</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya.</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki dokumen tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya namun tidak sah.</p>	<p>Perguruan tinggi tidak memiliki dokumen analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya.</p>

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
43	C.7 Penelitian C.7.4 Indikator Kinerja Utama C.7.4.a) Penelitian	A. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing nasional.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja.	Tidak ada Skor antara 0 dan 2.	Perguruan tinggi tidak memiliki dokumen Rencana Strategis Penelitian.
		B. Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh <i>stakeholders</i> .	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, serta dipahami oleh <i>stakeholders</i> .	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan dan mudah diakses oleh <i>stakeholders</i> .	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian namun belum disosialisasikan.	Perguruan tinggi tidak memiliki pedoman penelitian.
		C. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindak lanjuti.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang tidak lengkap.	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian.

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
		D. Dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu. Skor = $(A + (2 \times B) + (4 \times C) + D) / 8$	Perguruan tinggi memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.	Perguruan tinggi memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian yang memenuhi 3 dari 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait.	Perguruan tinggi memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian yang dibuat oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan/atau mitra/pemberi dana terkait.	Perguruan tinggi memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian yang dibuat oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi atau mitra/pemberi dana terkait.	Perguruan tinggi tidak memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian.
44	C.8 Pengabdian kepada masyarakat C.8.4 Indikator Kinerja Utama C.8.4.a) Pelaksanaan PkM	A. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi daya saing nasional.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja.	Tidak ada Skor antara 0 dan 2.	Perguruan tinggi tidak memiliki dokumen Rencana Strategis PkM.
		B. Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya.	Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.	Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.	Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.	Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM namun belum disosialisasikan.	Perguruan tinggi tidak memiliki pedoman PkM.

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
		<p>C. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM. 	<p>Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala.</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek.</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang tidak lengkap.</p>	<p>Perguruan tinggi tidak memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM.</p>
		<p>D. Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu. <p>Skor = $(A + (2 \times B) + (4 \times C) + D) / 8$</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek serta komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 3 dari 5 aspek serta komprehensif, rinci, dan relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan/atau mitra/pemberi dana terkait.</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi atau mitra/pemberi dana terkait.</p>	<p>Perguruan tinggi tidak memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM.</p>

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
45	C.8.4.a) Kelompok Pelaksana PkM	Keberadaan kelompok pelaksana PkM.	Perguruan tinggi memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.	Perguruan tinggi memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, dan 2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.	Perguruan tinggi memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM.	Perguruan tinggi tidak mempunyai bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM.	Perguruan tinggi tidak mempunyai kelompok pelaksana PkM.
46	C.9 Luaran dan Capaian Tridharma C.9.4 Indikator Kinerja Utama C.9.4.a) Pendidikan Tabel 5.a LKPT Capaian Pembelajaran	Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.	Perhitungan Skor untuk program Diploma dan Sarjana:				
			Jika $IPK \geq 3,25$, maka Skor = 4 .	Jika $2,00 \leq IPK < 3,25$, maka Skor = $((8 \times IPK) - 6) / 5$.		Tidak ada Skor kurang dari 2.	
			Perhitungan Skor untuk program Profesi, Magister dan Doktor:				
			Jika $IPK \geq 3,50$, maka Skor = 4 .	Jika $3,00 \leq IPK < 3,50$, maka Skor = $(4 \times IPK) - 10$.		Tidak ada Skor kurang dari 2.	
Skor akhir dihitung berdasarkan perhitungan rata-rata terbobot terhadap jumlah program studi pada setiap program pendidikan. Skor akhir = $\sum(\text{Skor}_i \times N_{Pi}) / \sum N_{Pi}$ N_{Pi} = jumlah program studi pada program pendidikan ke- i , $i = 1, 2, \dots, 7$							
47	Tabel 5.a.2) LKPT Sertifikat Kompetensi/ Profesi/ Industri	Persentase lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/ industri dalam 3 tahun terakhir.	Jika $P_{LS} \geq 30\%$, maka Skor = 4 .	Jika $P_{LS} < 30\%$, maka Skor = $1 + (10 \times PLS)$.		Tidak ada Skor kurang dari 1.	
			$P_{LS} = (N_{LS} / N_L) \times 100\%$ N_{LS} = Jumlah lulusan yang memiliki sertikat kompetensi, profesi, dan/atau industri dalam 3 tahun terakhir. N_L = Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir.				
48	Tabel 5.b.1) LKPT Prestasi Akademik Mahasiswa	Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).	Jika $R_i \geq a$, maka Skor = 4 .	Jika $R_i < a$ dan $R_N \geq b$, maka Skor = $3 + (R_i / a)$.	Jika $R_i = 0$ dan $R_N = 0$ dan $R_L \geq c$, maka Skor = 2 .	Tidak ada Skor kurang dari 1.	
				Jika $R_i < a$ dan $R_N < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (R_i/a)) + (R_N/b) - ((R_i \times R_N)/(a \times b))$.	Jika $R_i = 0$ dan $R_N = 0$ dan $R_L < c$, maka Skor = $1 + (R_L / c)$.		

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
			$R_I = N_I / N_M, R_N = N_N / N_M, R_L = N_L / N_M$ Faktor: $a = 0,05\%, b = 1\%, c = 5\%$ N_I = Jumlah prestasi akademik internasional. N_N = Jumlah prestasi akademik nasional. N_L = Jumlah prestasi akademik wilayah/lokal. N_M = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.				
49	Tabel 5.b.2) LKPT Prestasi Non-akademik Mahasiswa	Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).	<p>Jika $R_I \geq a$, maka Skor = 4 .</p>	<p>Jika $R_I < a$ dan $R_N \geq b$, maka Skor = 3 + (RI / a) .</p>	<p>Jika $R_I = 0$ dan $R_N = 0$ dan $R_L \geq c$, maka Skor = 2 .</p>	Tidak ada Skor kurang dari 1.	
				<p>Jika $R_I < a$ dan $R_N < b$, maka Skor = 2 + (2 x (RI/a)) + (RN /b) - ((RI x RN)/(a x b)) .</p>	<p>Jika $R_I = 0$ dan $R_N = 0$ dan $R_L < c$, maka Skor = 1 + (R_L / c) .</p>		
			$R_I = N_I / N_M, R_N = N_N / N_M, R_L = N_L / N_M$ Faktor: $a = 0,1\%, b = 2\%, c = 10\%$ N_I = Jumlah prestasi non-akademik internasional. N_N = Jumlah prestasi non-akademik nasional. N_L = Jumlah prestasi non-akademik wilayah/lokal. N_M = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.				
50	Tabel 5.c.1) LKPT Lama Studi Mahasiswa	Lama studi mahasiswa untuk setiap program dalam 3 tahun terakhir.	Perhitungan Skor untuk program Doktor Terapan:				
			<p>Jika $2 < MS \leq 3$, maka Skor₁ = 4 .</p>	<p>Jika $1 < MS \leq 2$, maka Skor₁ = (4 x MS) - 4 .</p>	<p>Jika $MS \leq 1$, maka Skor₁ = 0 .</p>		
				<p>Jika $3 < MS \leq 7$, maka Skor₁ = (11 - MS) / 2 .</p>			
			Perhitungan Skor untuk program Magister Terapan:				
			<p>Jika $1,5 < MS \leq 2$, maka Skor₂ = 4 .</p>	<p>Jika $1 < MS \leq 1,5$, maka Skor₂ = (8 x MS) - 8 .</p>	<p>Jika $MS \leq 1$, maka Skor₂ = 0 .</p>		
				<p>Jika $2 < MS \leq 4$, maka Skor₂ = 6 - MS .</p>			
			Perhitungan Skor untuk program Sarjana Terapan:				
<p>Jika $3,5 < MS \leq 4$, maka Skor₄ = 4 .</p>	<p>Jika $3 < MS \leq 3,5$, maka Skor₄ = (8 x MS) - 24 .</p>	<p>Jika $MS \leq 3$, maka Skor₄ = 0 .</p>					
	<p>Jika $4 < MS \leq 7$, maka Skor₄ = (20 - (2 x MS)) / 3 .</p>						
Perhitungan Skor untuk program Diploma Tiga:							

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
			Jika $3 < MS \leq 3,5$, maka Skor ₅ = 4 .	Jika $3,5 < MS \leq 5$, maka Skor ₅ = $(26 - (4 \times MS)) / 3$.			Jika $MS \leq 3$, maka Skor ₅ = 0 .
Perhitungan Skor untuk program Diploma Dua:							
			Jika $2 \leq MS \leq 2,5$, maka Skor ₅ = 4 .	Jika $2,5 < MS \leq 3$, maka Skor ₅ = $24 - (8 \times MS)$.			Jika $MS < 2$ atau $MS > 3$, maka Skor ₅ = 0 .
Perhitungan Skor untuk program Diploma Satu:							
			Jika $1 \leq MS \leq 1,5$, maka Skor ₅ = 4 .	Jika $1,5 < MS \leq 2$, maka Skor ₅ = $16 - (8 \times MS)$.			Jika $MS < 1$ atau $MS > 2$, maka Skor ₅ = 0 .
Skor akhir dihitung berdasarkan perhitungan rata-rata terbobot terhadap banyaknya program studi pada setiap program pendidikan. Skor akhir = $\sum(\text{Skor}_i \times N_{Pi}) / \sum N_{Pi}$ N_{Pi} = banyaknya program studi pada program pendidikan ke-i , i = 1, 2, ..., 7							
51	Tabel 5.c.2) LKPT	Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program.	Jika $P_{TWi} \geq 50\%$, maka Skor _i = 4 .		Jika $P_{TWi} < 50\%$, maka Skor _i = $1 + (6 \times P_{TWi})$.		Tidak ada Skor kurang dari 1.
Persentase untuk program pendidikan ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $P_{TWi} = (f_i / d_i) \times 100\%$ f_i = Jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu pada program pendidikan ke-i. d_i = Jumlah mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut pada program pendidikan ke-i. Skor akhir dihitung berdasarkan perhitungan rata-rata terbobot terhadap jumlah program studi pada setiap program pendidikan. Skor akhir = $\sum(\text{Skor}_i \times N_{Pi}) / \sum N_{Pi}$ N_{Pi} = banyaknya program studi pada program pendidikan ke-i , i = 1, 2, ..., 7							
52		Persentase keberhasilan studi untuk setiap program.	Jika $P_{PSi} \geq 85\%$, maka Skor _i = 4 .	Jika $30\% < P_{PSi} < 85\%$, maka Skor _i = $((80 \times P_{PSi}) - 24) / 11$.			Jika $P_{PSi} \leq 30\%$, maka Skor = 0 .
Persentase untuk program pendidikan ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $P_{PSi} = (c_i / a_i) \times 100\%$ c_i = Jumlah mahasiswa yang lulus sampai dengan batas masa studi pada program pendidikan ke-i. a_i = Jumlah mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut pada program pendidikan ke-i. Skor akhir dihitung berdasarkan rata-rata terbobot terhadap jumlah program studi pada setiap program pendidikan. Skor akhir = $\sum(\text{Skor}_i \times N_{Pi}) / \sum N_{Pi}$ N_{Pi} = Jumlah program studi pada program ke-i , i = 1, 2, ..., 7							

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
53	Tabel 5.d.1) LKPT Waktu Tunggu Lulusan	Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama.	Jika $WT \leq 3$ bulan , maka Skor = 4 .	Jika $3 < WT < 12$, maka Skor = $(48 - (4 \times WT)) / 9$.			Jika $WT \geq 12$ bulan , maka Skor = 0 .
			$NL = NL_4 + NL_3 + NL_2$, $NJ = NJ_4 + NJ_3 + NJ_2$ $PJ = (NJ / NL) \times 100\%$ $WT = \text{rata-rata waktu tunggu lulusan} = (WT_4 + WT_3 + WT_2) / 3$ Ketentuan persentase responden lulusan: - untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun paling sedikit 5000 orang, maka $P_{\text{min}} = 10\%$. - untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun kurang dari 5000 orang, maka $P_{\text{min}} = 20\% - (10\% / 5000) \times NL$. Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = $(PJ / P_{\text{min}}) \times \text{Skor}$.				
54	Tabel 5.d.2) LKPT Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan	Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi.	Jika $P_{\text{BS}} \geq 80\%$, maka Skor = 4 .	Jika $P_{\text{BS}} < 80\%$, maka Skor = $5 \times P_{\text{BS}}$.			
			$NL = NL_4 + NL_3 + NL_2$, $NJ = NJ_4 + NJ_3 + NJ_2$ $PJ = (NJ / NL) \times 100\%$ $P_{\text{BS}} = \text{Rata-rata persentase kesesuaian bidang kerja lulusan} = (KB_4 + KB_3 + KB_2) / 3$ Ketentuan persentase responden lulusan: - untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun paling sedikit 5000 orang, maka $P_{\text{min}} = 10\%$. - untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun kurang dari 5000 orang, maka $P_{\text{min}} = 20\% - (10\% / 5000) \times NL$. Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = $(PJ / P_{\text{min}}) \times \text{Skor}$.				
55	Tabel 5.e.1) LKPT Kepuasan Pengguna Lulusan	Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek:	$\text{Skor} = \sum TK_i / 7$				

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
		1 : Etika, 2 : Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3 : Kemampuan berbahasa asing, 4 : Penggunaan teknologi informasi, 5 : Kemampuan berkomunikasi, 6 : Kerjasama tim, 7 : Pengembangan diri.	Tingkat kepuasan aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $TK_i = (4 \times a_i) + (3 \times b_i) + (2 \times c_i) + d_i$ $i = 1, 2, \dots, 7$ a_i = persentase "sangat baik". b_i = persentase "baik". c_i = persentase "cukup". d_i = persentase "kurang". $NL = NL_1 + NL_2 + NL_3$, $NJ = NJ_1 + NJ_2 + NJ_3$ $PJ = (NJ / NL) \times 100\%$ $P_{BS} = \text{Rata-rata persentase kesesuaian bidang kerja lulusan} = (KB_1 + KB_2 + KB_3) / 3$ Jumlah tanggapan pengguna lulusan yang memberikan jawaban paling sedikit: - 10% untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan tiap tahun paling sedikit 5000 orang. - 20% untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan tiap tahun kurang dari 5000 orang. Jika jumlah tanggapan pengguna lulusan yang memberikan jawaban memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Jika jumlah tanggapan pengguna lulusan yang memberikan jawaban tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku perhitungan Skor akhir sebagai berikut: - untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan tiap tahun paling sedikit 5000 orang, maka Skor akhir = $(PJ / 10\%) \times \text{Skor}$. - untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan tiap tahun kurang dari 5000 orang, maka Skor akhir = $(PJ / 20\%) \times \text{Skor}$.				
56	Tabel 5.e.2) LKPT Tempat Kerja Lulusan	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	Jika $R_i \geq a$, maka Skor = 4 .	Jika $R_i < a$ dan $R_N \geq b$, maka Skor = 3 + (R_i / a) . Jika $0 < R_i < a$ atau $0 < R_N < b$, maka Skor = 2 + $(2 \times (R_i/a)) + (R_N/b) - ((R_i \times R_N) / (a \times b))$	Jika $R_i = 0$ dan $R_N = 0$ dan $R_L \geq c$, maka Skor = 2 . Jika $R_i = 0$ dan $R_N = 0$ dan $R_L < c$, maka Skor = $(2 \times R_L) / c$.	$R_i = (N_i / N_A) \times 100\%$, $R_N = (N_N / N_A) \times 100\%$, $R_L = (N_L / N_A) \times 100\%$ Faktor: a = 5% , b = 20% , c = 90% . N_i = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multi nasional. N_N = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin. N_L = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin. $NL = NL_4 + NL_3 + NL_2$, $NJ = NJ_4 + NJ_3 + NJ_2$ $PJ = (NJ / NL) \times 100\%$ Ketentuan persentase responden lulusan: - untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun paling sedikit 5000 orang, maka $P_{min} = 10\%$. - untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun kurang dari 5000 orang, maka $P_{min} = 20\% - (10\% / 5000) \times NL$. Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = $(PJ / P_{min}) \times \text{Skor}$.	

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
57	C.9.4.b) Penelitian Tabel 5.f LKPT Publikasi Ilmiah	Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir.	Jika $R_I \geq a$, maka Skor = 4 .	Jika $R_I < a$ dan $R_N \geq b$, maka Skor = 3 + (R_I / a) .		Jika $R_I = 0$ dan $R_N = 0$ dan $R_L \geq c$, maka Skor = 2 .	
				Jika $0 < R_I < a$ atau $0 < R_N < b$, maka Skor = 2 + $(2 \times (R_I/a)) + (R_N/b) - ((R_I \times R_N) / (a \times b))$		Jika $R_I = 0$ dan $R_N = 0$ dan $R_L < c$, maka Skor = $(2 \times R_L) / c$.	
			$R_L = N_{A1} / N_{DT}$, $R_N = (N_{A2} + N_{A3}) / N_{DT}$, $R_I = N_{A4} / N_{DT}$ Faktor: a = 0,05 , b = 0,5 , c = 1 N_{A1} = Jumlah publikasi di jurnal tidak terakreditasi. N_{A2} = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi. N_{A3} = Jumlah publikasi di jurnal internasional. N_{A4} = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. N_{DT} = Jumlah dosen tetap.				
58		Jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir.	Jika $R_I \geq a$, maka Skor = 4 .	Jika $R_I < a$ dan $R_N \geq b$, maka Skor = 3 + (R_I / a) .		Jika $R_I = 0$ dan $R_N = 0$ dan $R_L \geq c$, maka Skor = 2 .	
				Jika $0 < R_I < a$ atau $0 < R_N < b$, maka Skor = 2 + $(2 \times (R_I/a)) + (R_N/b) - ((R_I \times R_N) / (a \times b))$		Jika $R_I = 0$ dan $R_N = 0$ dan $R_L < c$, maka Skor = $(2 \times R_L) / c$.	
			$R_L = N_{B1} / N_{DT}$, $R_N = N_{B2} / N_{DT}$, $R_I = N_{B3} / N_{DT}$ Faktor: a = 0,05 , b = 0,5 , c = 1 N_{B1} = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi. N_{B2} = Jumlah publikasi di seminar penelitian nasional. N_{B3} = Jumlah publikasi di seminar penelitian internasional. N_{DT} = Jumlah dosen tetap.				
59	Tabel 5.g LKPT Produk/jasa yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat.	Rasio jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.	Jika $R_S \geq 1$, maka Skor = 4 .	Jika $R_S < 1$, maka Skor = 2 + $(2 \times R_S)$.		Tidak ada Skor kurang dari 2.	
			$R_S = N_{APJ} / N_{PS}$ N_{APJ} = Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir. N_{PS} = Jumlah program studi.				
60	Tabel 5.h LKPT Luaran Lainnya	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.	Jika $R_{LP} \geq 1$, maka Skor 4 .	Jika $R_{LP} < 1$, maka Skor = 2 + $(2 \times R_{LP})$.		Tidak ada Skor kurang dari 2.	
			$R_{LP} = (2 \times N_A + 4 \times (N_B + N_C) + N_D) / N_{DT}$ N_A = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Patent, Patent Sederhana) N_B = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) N_C = Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. N_D = Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i> . N_{DT} = Jumlah dosen tetap.				

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
61	D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan D.1 Analisis dan Capaian Kinerja	Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	Perguruan tinggi telah melakukan analisis capaian kinerja yang: 1) analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi. 2) konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya, 3) analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah institusi. 4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses.	Perguruan tinggi telah melakukan analisis capaian kinerja yang: 1) analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang belum terintegrasi. 2) konsisten dengan sebagian besar (7 s.d. 8) kriteria yang diuraikan sebelumnya, 3) analisisnya dilakukan secara komprehensif dan tepat untuk mengidentifikasi akar masalah institusi. 4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal serta mudah diakses.	Perguruan tinggi telah melakukan analisis capaian kinerja yang: 1) analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai). 2) konsisten dengan sebagian (5 s.d. 6) kriteria yang diuraikan sebelumnya, 3) analisisnya dilakukan secara komprehensif untuk mengidentifikasi akar masalah institusi. 4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal.	Perguruan tinggi telah melakukan analisis capaian kinerja yang: 1) analisisnya tidak sepenuhnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai). 2) konsisten dengan sebagian kecil (kurang dari 5) kriteria yang diuraikan sebelumnya, 3) analisisnya dilakukan tidak secara komprehensif untuk mengidentifikasi akar masalah institusi. 4) hasilnya tidak dipublikasikan.	Perguruan tinggi tidak melakukan analisis capaian kinerja.
62	D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan	Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan didalam mengembangkan strategi institusi.	Perguruan tinggi melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi dilakukan secara tepat,	Perguruan tinggi melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi dilakukan secara tepat,	Perguruan tinggi melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi dilakukan secara tepat, dan	Perguruan tinggi melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi, dan	Perguruan tinggi tidak melakukan analisis untuk mengembangkan strategi institusi.

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
			2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, 3) merumuskan strategi pengembangan institusi yang berkesesuaian, dan 4) menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.	2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, dan 3) merumuskan strategi pengembangan institusi yang berkesesuaian.	2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja.	2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, namun tidak terstruktur dan tidak sistematis.	
63	D.3 Program Pengembangan	Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	Perguruan tinggi menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: 1) kapasitas institusi, 2) kebutuhan institusi di masa depan, 3) rencana strategis institusi yang berlaku, 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan 5) program yang menjamin keberlanjutan.	Perguruan tinggi menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: 1) kapasitas institusi, 2) kebutuhan institusi di masa depan, 3) rencana strategis institusi yang berlaku, dan 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal.	Perguruan tinggi menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: 1) kapasitas institusi, 2) kebutuhan institusi di masa depan, dan 3) rencana strategis institusi yang berlaku.	Perguruan tinggi menetapkan prioritas program pengembangan namun belum mempertimbangkan secara komprehensif: 1) kapasitas institusi, 2) kebutuhan institusi, dan 3) rencana strategis institusi yang berlaku.	Perguruan tinggi tidak menetapkan prioritas program pengembangan.
64	D.4 Program Keberlanjutan	Perguruan tinggi memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan,	Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan, dan	Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan upaya untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan, dan	Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan upaya namun belum cukup untuk menjamin keberlanjutan program.	Perguruan tinggi tidak memiliki kebijakan dan upaya untuk menjamin keberlanjutan program.

No	Elemen	Indikator	Skor					
			4	3	2	1	0	
			3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan 4) keberadaan dukungan <i>stakeholders</i> eksternal.	3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan.	3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan.			